

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan sistem ekonomi negara diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945, mengatur tanggungjawab yang dibebankan kepada negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain ditujukan kepada negara, tanggungjawab juga dibebankan kepada golongan yang mampu berusaha, dan karena itu dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 memuat semangat kebersamaan (kekeluargaan), sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial, pelaku usaha, bangunan dan wadah/bentuk usaha, cara penggunaan/proses berusaha, serta tujuan akhir kegiatan usaha yaitu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.¹

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, sampai saat ini struktur ekonomi Indonesia disangga oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kelompok usaha besar. Sumbangan dari kelompok ini sangat berarti dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan peran usaha besar, koperasi, maupun BUMN.

UMKM merupakan fenomena baru dimana eksistensinya dalam perekonomian Indonesia, menjadi isu penting sebagai pilar ekonomi disamping BUMN, Badan Usaha Swasta, dan bentuk badan usaha lainnya. Namun kenyataannya keberadaan UMKM masih sebagai kelompok usaha yang terpinggirkan dalam situasi kerasnya menghadapi persaingan bisnis

¹ Astrarudin, *Perjanjian Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Usaha Besar Sebagai Upaya Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1-2. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2008, 95-97 (Selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie I).

domestik dan *free trade global* seperti *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA).²

Perkembangan UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal mana ditunjukkan oleh keberadaan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja.

Ditengah perkembangan ekonomi yang ada, UMKM sebagai pilar ekonomi nasional dari segi kuantitas belum diimbangi dengan peningkatan kualitas yang memadai. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas dan daya saing, sehingga menimbulkan kesenjangan besar antara UMKM dengan usaha berskala besar. Peningkatan produktivitas sangat dibutuhkan guna mendorong peningkatan daya saing UMKM untuk bisa berkompetensi, baik dalam kancah perekonomian domestik maupun global.

Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari usaha ekonomi kerakyatan penting untuk diberdayakan ditengah perkembangan zaman. Bila UMKM sebagai bentuk ekonomi kerakyatan kurang diberdayakan, maka ia tidak akan mempunyai daya saing ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi global. Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UMKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu diharapkan kelompok UMKM ini terus berperan optimal dalam menanggulangi pengangguran yang jumlahnya meningkat.³

Pembangunan ekonomi⁴ di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah

² Retno M urni et. all., *Eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Penopang Industri Pariwisata Berkelanjutan di Bali*, Jurnal Elmiyah Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 36 No.2 September 2011, 103.

³ Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-isu Penting*, LP3ES, Jakarta, XVI.

⁴ Partomo, Titik Sartika. 2004. *Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Working Paper Series 9*. Center For Industry and SME Studies, Faculty Of Economics University of Trisakti

penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Koperasi dan UMKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UMKM oleh pemerintah sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Problem krusial yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Terbatasnya akses UMKM terhadap modal menyebabkan sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mengembangkan produk-produk yang berdaya saing.

Problem akses modal UMKM sumber penyebabnya justru karena keterbatasan UMKM itu sendiri baik dari segi pemasaran, penguasaan teknologi dan informasi, serta buruknya manajemen usaha.

Faktor tersebut menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan bantuan permodalan dalam bentuk kredit terhadap UMKM. Selain itu, ketidakmampuan UMKM untuk menyediakan jaminan (agunan) telah menyulitkan UMKM untuk mengakses kredit dari perbankan.

Semua negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia mengalami problem yang sama berkaitan dengan terbatasnya akses UMKM terhadap modal. Usaha yang berskala besar maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena disamping berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Bila dilihat dari eksistensi UMKM sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan⁵, telah menghadapi berbagai problematik, baik problematik sosiologis, filosofis maupun yuridis terkait dengan upaya pemberdayaan UMKM dalam perekonomian nasional.

Berbagai problematik dimaksud penting kiranya untuk dikaji mengingat begitu besarnya peran UMKM sebagai motor penggerak pembangunan dibidang ekonomi. Secara sosiologis problem yang dihadapi UMKM adalah masih kurang maksimalnya perhatian dari pemerintah terhadap UMKM, terutama dari segi akses permodalan usaha. Banyak produk deregulasi yang justru mengorbankan pengusaha yang masuk kategori UMKM, baik langsung maupun tidak langsung, padahal kalangan pengusaha ini dalam berbagai peristiwa justru menjadi penggerak utama kekuatan sosial.⁶

Modal merupakan kunci dari berlangsungnya usaha, sebab tanpa modal tidak mungkin UMKM dapat menjalankan usaha yang diinginkannya. Fenomena yang dihadapi UMKM memang tidak hanya menyangkut modal, tetapi juga lemah dari segi sumber daya manusia, teknologi, manajemen, maupun akses pasar, sehingga sulit untuk bersaing dan bermitra dengan usaha besar.⁷

Permasalahan utama UMKM saat ini utamanya terkait dengan kesulitan dalam hal permodalan dan pemasaran. Menurut Ina Primiana, beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM terkait permodalan, yaitu;

⁵ Ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya pemberdayaan (kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Rakyat yang dimaksud dalam perekonomian di Indonesia adalah rakyat yang berada pada kelas menengah ke bawah yang mendominasi, dengan modal kecil, teknologi sederhana, dan pada sektor agraris. Lihat Tara, Azwir, 2001, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*, Nuansa Madani, Jakarta, 1.

⁶ Normin S. Pakpahan, Frans Limahelu, 1992, *Peta Hukum Dibidang Kegiatan Ekonomi, Suatu Studi Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada Sepuluh Provinsi di Indonesia*, Kantor Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 12.

⁷ Mohammad Jafar Hafsa, 2000, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 67. Lihat juga Budi Rachmat, 2005, *Modal Ventura, Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 21.

1. Kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan agar *bankable*. Sebetulnya Bank Indonesia telah banyak membantu UMKM agar dapat lebih mudah untuk mendapatkan akses kredit dari bank, namun kenyataannya tidak semua UMKM dapat memenuhi persyaratan *collateral*. Artinya masih lebih banyak UMKM yang belum terjangkau.
2. Ketidaktahuan UMKM terhadap cara memperoleh dana atau modal dari sumber-sumber lain, selain perbankan yang dapat menjadi sumber pembiayaan.
3. Tidak tersedianya modal pada saat pesanan datang. Artinya mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi pesanan. Hal ini tidak mungkin bisa dipenuhi oleh perbankan, karena pengajuan kredit bank membutuhkan waktu lama (bisa mencapai 2 – 3 bulan).⁸

Kendala dan keterbatasan permodalan yang dialami oleh UMKM yang menyulitkan dirinya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara wajar. Adanya order yang cukup besar dari pelanggan seringkali ditolak karena modal tidak mencukupi. Setiap pengajuan pinjaman melalui perbankan atau koperasi sering ditolak karena terkendala agunan.

Agunan merupakan barang-barang kebendaan milik debitur yang dijadikan jaminan untuk melunasi utangnya.⁹ Pengertian agunan seperti diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu ; a. Merupakan jaminan tambahan, b. Benda/barang milik nasabah debitur yang diserahkan kepada bank/kreditur, c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan.¹⁰ Fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan betapa lemahnya posisi UMKM dari segi akses pasar karena tidak mampu bersaing dengan usaha besar yang bermodal kuat. Disini terasa betapa sulitnya

⁸ Ina Primi ana, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 49-50

⁹ Suhariningsi h, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Inventory dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Universitas Wisnuwardana Press, Malang, 19-20.

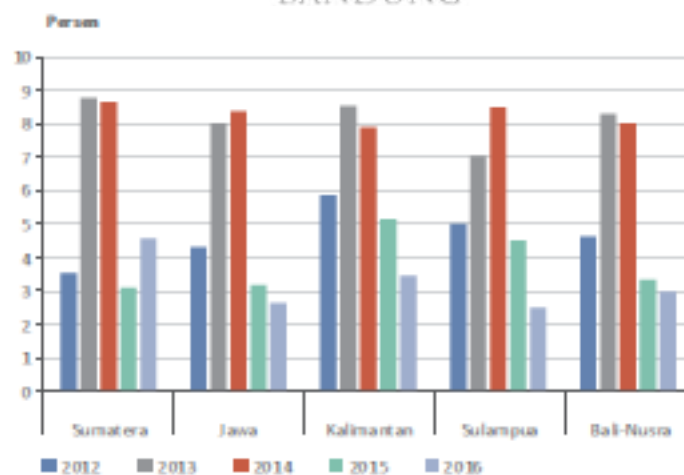
¹⁰ Ibid, Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

kelompok usaha ini untuk mengembangkan usaha mereka karena adanya kendala dalam penyediaan modal. Peranan modal menjadi sangat besar ketika UMKM akan ikut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sebagai dampak dari kegiatan utamanya adalah tersedianya cukup modal.

. Selain faktor diatas, berdasar pengamatan awal penulis hal lain yang mempengaruhi tumbuh kembangnya UMKM adalah pertumbuhan ekonomi global. Dunia usaha tidak terlepas dari turbulensi dan resiko keuangan, dalam perkembangan UMKM resiko menjadi lebih tinggi karena aset yang kecil membuat dana usaha habis dalam pembayaran kewajiban kredit, terutama saat inflasi dan suku bunga tinggi. Kenaikan inflasi dan suku bunga akan membuat biaya keuangan dalam usaha semakin tinggi, sehingga dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha.

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan yang tercermin pula oleh turunnya *return* saham (Nurdin, 1999).

Grafik 1.1 Perkembangan Inflasi Regional 2012-2016.



Sumber: BPS Diolah

Tahun 2015, kinerja industri perbankan mengalami sedikit perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun kinerja intermediasi melambat, industri perbankan masih mampu menjaga profitabilitasnya tumbuh positif. Pertumbuhan kredit pada tahun 2015 melambat menjadi 10,4% dari 11,6% pada tahun 2014. Akibat dari perlambatan tersebut, rasio Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM) juga mengalami penurunan, namun masih pada level yang cukup tinggi. Belum pulihnya perekonomian domestik yang diikuti dengan peningkatan persepsi risiko kredit oleh bank telah mengurangi dampak pelonggaran kebijakan makropudensial dalam mendorong pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan, termasuk kredit kepada UMKM, tahun 2015 relatif terbatas dan lebih rendah dari prakiraan semula. Pada tahun 2015, kinerja industri perbankan, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dan pasar modal mengalami sedikit perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun demikian, ditengah berbagai tekanan, ketahanan perbankan nasional masih cukup kuat yang tercermin dari rasio permodalan yang tinggi dan risiko kredit yang terkendali. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) masih terjaga di level yang aman meskipun terjadi perlambatan ekonomi domestik sejak tahun 2014. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menahan risiko instabilitas di sektor keuangan. Salah satu indikator yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai kondisi stabilitas sistem keuangan adalah Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)(Grafik 1.2).¹¹

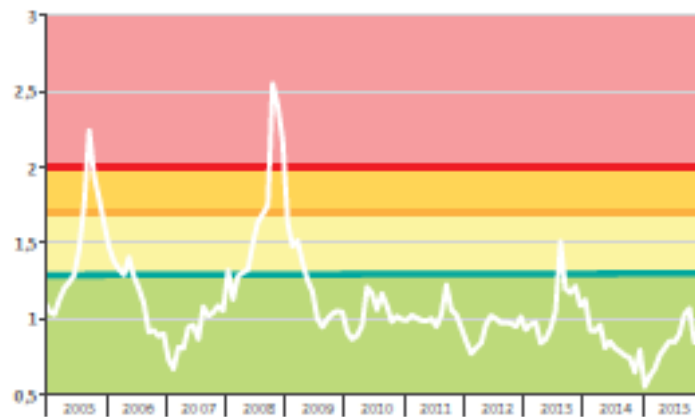
Perlambatan intermediasi bank syariah diikuti dengan penurunan kinerja. Secara profitabilitas, bank syariah cenderung stagnan di level yang cukup rendah, yang ditunjukkan dengan ROA yang jauh di bawah industri perbankan.

Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2015 relatif Stagnan. Perlambatan kinerja intermediasi dan peningkatan risiko pembiayaan juga dialami perbankan syariah. Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit perbankan,

¹¹ Komponen pembentuk ISSK adalah Indeks Stabilitas Institusi Keuangan yang terdiri dari komponen tekanan, intermediasi dan efisiensi perbankan serta Indeks Stabilitas Pasar Keuangan.

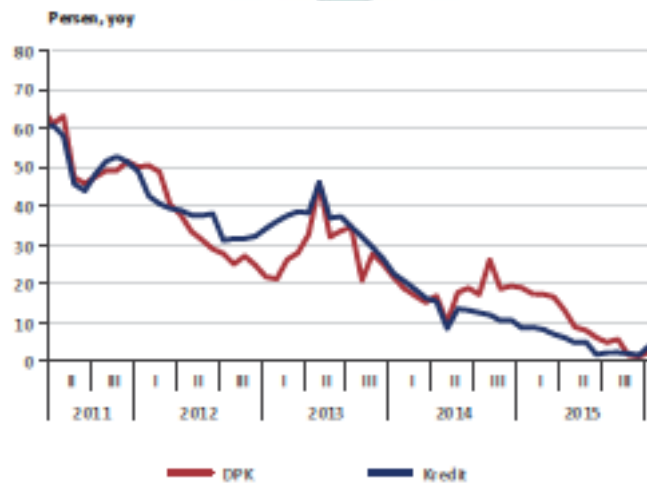
pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah pada tahun 2015 juga melambat menjadi 4,1%, dari 8,7% pada akhir tahun 2014 (Grafik 1.3).

Grafik 1.2 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan



Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia
Tahun 2005-2015

Grafik 1.3 Perkembangan Intermediasi bank Syari'ah



Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia Tahun 2011-2015

Perlambatan juga terjadi pada kinerja penghimpunan DPK dari 19,0% pada akhir tahun 2014 menjadi 2,4% pada akhir tahun 2015. Perlambatan kinerja intermediasi perbankan syariah tersebut lebih dalam dibandingkan dengan perlambatan industri perbankan nasional secara umum, dengan NPF yang cukup tinggi yaitu 4,8%, sedikit membaik dari tahun sebelumnya yang mencapai 5%.

Perkembangan, Kinerja dan Risiko Kredit UMKM Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik juga berdampak pada perlambatan permintaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akibat turunnya permintaan barang dan jasa. Di sisi lain, meningkatnya persepsi risiko kredit membuat perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pada tahun 2015, kredit UMKM mencapai Rp790,5 triliun atau hanya tumbuh sebesar 8,0% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 15,1% (yoy). Perlambatan kredit UMKM terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi, seperti sektor industri pengolahan yang tumbuh 10,0%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2014 sebesar 19,6%. Menurunnya permintaan barang dan jasa juga berdampak pada sektor lainnya.

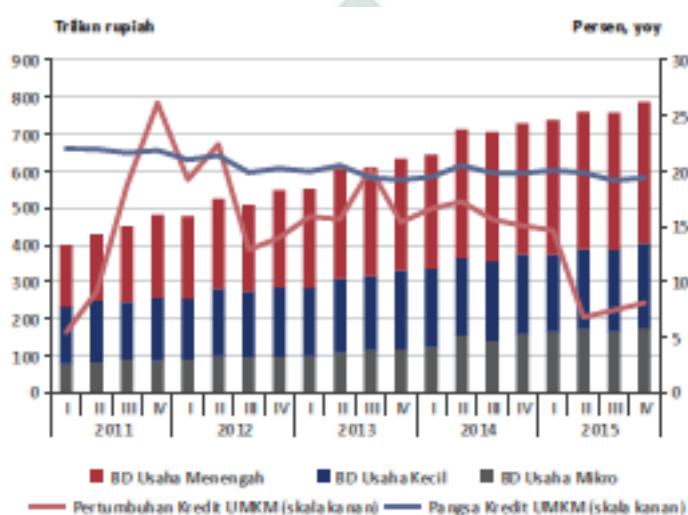
Berdasarkan klasifikasi usaha, perlambatan kredit UMKM terutama terjadi pada usaha mikro yang tumbuh sebesar 11,2%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 33,4%. Hal ini terkait dengan strategi perbankan, terutama bank-bank yang memiliki keterbatasan jaringan dan SDM, yang cenderung menahan penyaluran kredit usaha mikro akibat meningkatnya NPL. Bank-bank tersebut lebih fokus pada upaya perbaikan NPL pada tahun 2015. Di sisi lain, kredit usaha kecil menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 1,3% pada tahun 2014 menjadi 6,4% pada tahun 2015.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada tahun 2015 mencapai 19,3%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 19,7%. Porsi tersebut sebagian besar diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 52,2% (Rp412,7 triliun). Berdasarkan klasifikasi usaha, sebagian besar kredit UMKM disalurkan kepada usaha menengah dengan pangsa 48,6%, disusul oleh usaha kecil dengan pangsa 29,1%, dan usaha mikro dengan pangsa 22,3% (Grafik 8.17). Sementara itu berdasarkan lokasi proyek, penyerapan kredit UMKM masih terpusat di Jawa dengan pangsa sebesar 57,8%, disusul Sumatera sebesar 20,3%, dan Sulawesi sebesar 7,1%. Mayoritas kredit UMKM di ketiga wilayah tersebut diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran masing-masing sebesar 50,7%, 51,3% dan 62,5%.

Untuk terus mendorong penyaluran kredit kepada UMKM yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, pada tahun 2015 Bank Indonesia

menerbitkan aturan yang memberikan insentif dan disinsentif bagi Bank Umum dalam pencapaian target penyaluran kredit UMKM. Pada akhir tahun 2015, Bank Umum wajib memenuhi tahap awal rasio kredit/pembiayaan UMKM minimal 5% dari total kredit/pembiayaan, serta menjaga rasio NPL kurang dari 5%. Mayoritas bank telah memenuhi rasio kredit UMKM di atas 5%, dan sebagian besar di antaranya juga mampu menjaga rasio NPL kredit UMKM dan NPL total kredit di bawah 5%. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Grafik 1.4 Trend Penyaluran Kredit UMKM

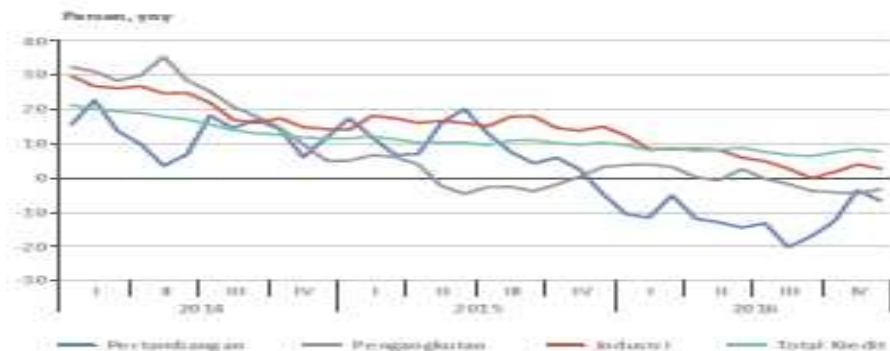


Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia Tahun 2011-2015.

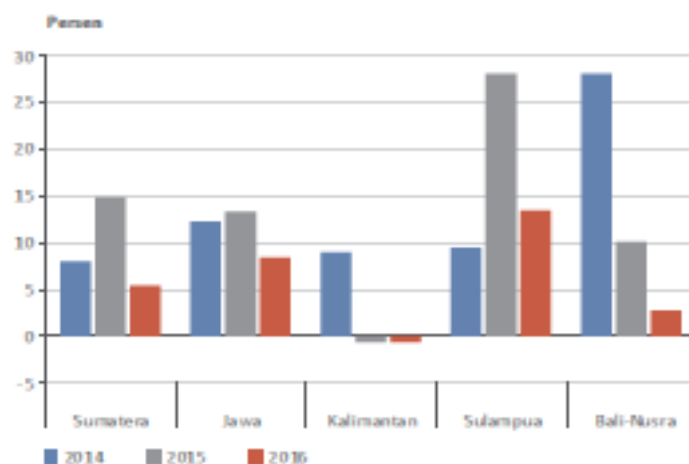
Tahun 2016 pada laporan keuangan Bank Indonesia mengenai kinerja dan risiko industri perbankan. Sejalan dengan proses konsolidasi korporasi, pertumbuhan kredit perbankan melambat dari 10,5% pada 2015 menjadi 7,9% pada 2016 yang merupakan pertumbuhan terendah sejak 2002. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terendah terjadi pada jenis Kredit Modal Kerja (KMK). Hal tersebut sejalan dengan masih rendahnya aktivitas penjualan korporasi yang mengakibatkan permintaan modal kerja korporasi terutama untuk pembelian bahan baku menurun.

Penyaluran kredit perbankan di daerah hingga akhir 2016 secara umum menunjukkan perlambatan seiring dengan konsolidasi pelaku usaha. Melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit kepada korporasi paling dalam, yang turun dari 20,6% pada 2015 menjadi 9,4% pada 2016.

Grafik 1.5 Sektor Pertumbuhan Kredit Rendah



Grafik 1.6 Sektor Pertumbuhan Kredit Korporasi di Daerah Tahun 2014-2016

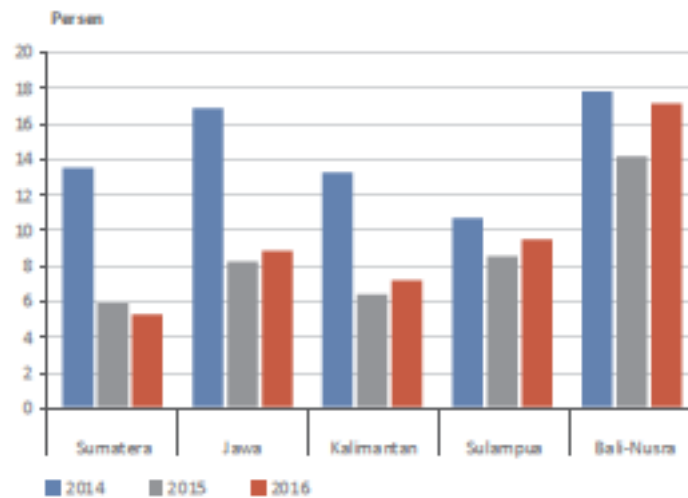


Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia Tahun 2014-2016

Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM di berbagai wilayah di KTI ditopang oleh kredit ke lapangan usaha perdagangan. Dengan porsi yang besar (diatas 60%) terhadap total kredit UMKM di KTI, kredit ke lapangan usaha perdagangan mampu tumbuh tinggi sebesar 11,5% (yoy) pada 2016. Pertumbuhan kredit UMKM ke lapangan usaha perdagangan juga menopang pertumbuhan kredit UMKM ke Jawa dan Kalimantan, yang tercatat masing-masing tumbuh 8,8% dan 7,1% pada 2016, meningkat dibanding 2015 yang tercatat masing-masing 8,2% dan 6,3%. Di sisi lain, kredit UMKM di Sumatera justru tumbuh melambat, dari 5,8% pada 2015 menjadi 5,2% akibat menurunnya kredit ke lapangan usaha perdagangan dan pertanian. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM untuk modal kerja tercatat lebih tinggi di hampir

seluruh wilayah, kecuali di Sumatera. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, sebagaimana tercermin dari perbaikan rasio NPL untuk kredit UMKM di hampir seluruh wilayah. Kenaikan NPL untuk kredit UMKM hanya terjadi di Jawa dan Bali-Nusra, namun masih di bawah batas aman 5%.

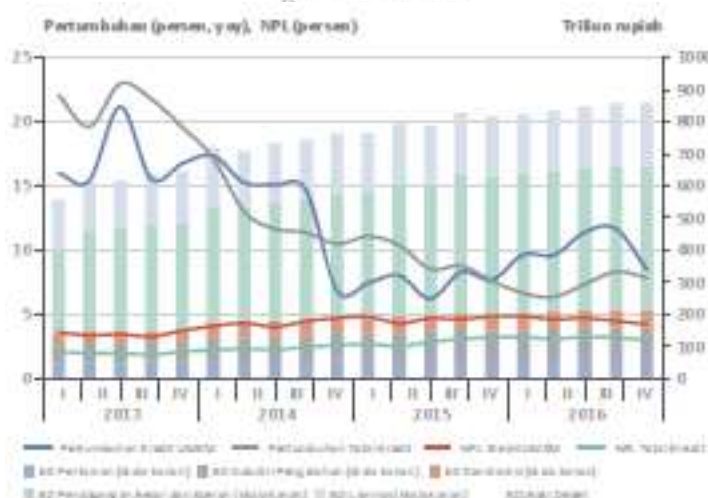
Grafik 1.7 Sektor Pertumbuhan Kredit UMKM di Daerah



Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia Tahun 2014-2016

Penyaluran kredit UMKM pada 2016 menunjukkan peningkatan. Posisi kredit UMKM mencapai Rp857 triliun atau 19,4% dari total kredit perbankan nasional. Kredit UMKM pada 2016 tumbuh sebesar 8,4% atau tumbuh sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2015 sebesar 8,0%.

Grafik 1.8 Perkembangan Kredit UMKM.



Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia Tahun 2013-2016

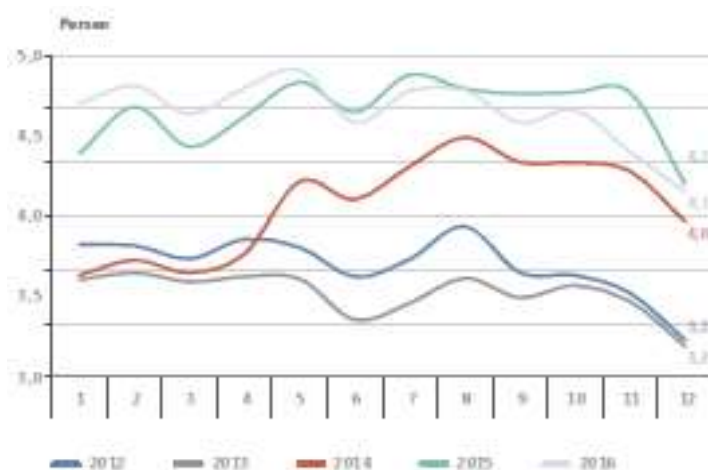
Berdasarkan jumlah rekening kreditnya, sekitar 23,1% UMKM pada 2016 telah memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan, meningkat dibandingkan dengan 2015 sebesar 20,6%. Peningkatan kredit UMKM tersebut ditengarai didorong oleh penurunan suku bunga kredit, dan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal Kerja tumbuh sebesar 9,2%, meningkat dari 7,6% pada akhir 2015.

Dari lima sektor dengan pangsa kredit UMKM terbesar, sektor perdagangan, real estate, dan pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan kredit UMKM tertinggi. Ketiga sektor tersebut memiliki pertumbuhan tertinggi sepanjang 2016, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,9%, 11,5% dan 11,0% . Berdasarkan klasifikasi usaha, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi sepanjang 2016 adalah kredit yang disalurkan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tumbuh masing-masing sebesar 10,9% dan 11,1%. Sementara itu, kredit Usaha Menengah hanya tumbuh 5,7%. Tingginya pertumbuhan kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil sejalan dengan penyaluran KUR pada 2016 yang cukup tinggi. Secara spasial, sebaran penyaluran kredit UMKM masih belum merata dan terfokus pada wilayah-wilayah pusat aktivitas ekonomi. Hal tersebut tercermin dari realisasi kredit UMKM di pulau Jawa dan Sumatera yang mendominasi dengan pangsa sebesar 58,0% dan 19,7%. Sementara pangsa untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua masih relatif rendah, yakni masing-masing sebesar 7,2%, 7,0%, 5,7% dan 2,3%. Kondisi ini antara lain karena ketersediaan infrastruktur perbankan mayoritas berada di wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Secara sektoral, mayoritas kredit UMKM diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa 52,7% dan ditujukan pada kelompok Usaha Menengah. Dominasi sektor Perdagangan tersebut dipengaruhi oleh potensi risiko yang lebih terukur, sementara penyaluran kredit UMKM kepada sektor lainnya masih rendah.

Tingkat risiko kredit UMKM pada 2016 cenderung membaik dibandingkan 2015, terutama sejak pertengahan 2016. NPL kredit UMKM menurun dari 4,2% pada 2015 menjadi 4,15% pada akhir 2016. Tingkat risiko kredit UMKM tersebut masih relatif tinggi dibandingkan dengan periode 3 tahun

terakhir yang dipengaruhi oleh masih belum kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik.

Grafik 1.9 NPL Gross Kredit UMKM.



Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia(Data Sekunder)

Namun demikian, upaya perbankan untuk memperbaiki kolektibilitas nasabah UMKM, dapat menekan risiko yang ditandai dengan penurunan rasio NPL gross kredit UMKM pada akhir 2016. Upaya lain yang dilakukan oleh perbankan untuk menekan risiko adalah dengan meningkatkan penyaluran kredit UMKM secara selektif. Dari lima sektor ekonomi dengan pangsa penyaluran kredit UMKM terbesar, perbaikan kualitas kredit terjadi pada sector perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Rasio NPL ketiga sektor tersebut membaik menjadi 3,9%, 4,2%, dan 6,7%, meskipun masih memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Berdasarkan klasifikasi usaha, membaiknya rasio NPL pada 2016, terjadi pada kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil menjadi 2,1% dan 4,3%. Sedangkan rasio NPL kredit Usaha Menengah tercatat memburuk menjadi 5,1%. Membaiknya NPL di kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil, ditengarai akibat rasio NPL KUR yang tercatat relatif kecil yaitu sebesar 0,4%. Terkait dengan kewajiban pencapaian rasio kredit UMKM bank umum pada akhir 2016 minimal sebesar 10%, jumlah bank yang telah memenuhi ketentuan hanya sebanyak 56 bank dengan kualitas terjaga.

Dari data konsolidasi Bank Indonesia(BI) diatas membuktikan bahwa pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk

berkembang. Karenanya UMKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif. Persoalan-persoalan yang menghambat usaha usaha pemberdayaan UMKM harus dihilangkan. Konstitusi kebijakan ekonomi pemerintah harus menempatkan UMKM sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional (Pratomo, 2004:24).

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Bank juga berperan sebagai pelaksana kebijakan moneter dan pencapai stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, idealnya perbankan Indonesia di dominasi oleh perbankan syariah. Dalam fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon dari pemerintah, yang antara lain melalui dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut *Dual Banking System*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah. Namun Peran pemerintah dalam memajukan perbankan syariah belum begitu bagus, perbankan Indonesia masih didominasi oleh perbankan konvensional. Sejumlah bank masih menghadapi

kendala pemenuhan rasio kredit UMKM, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kurangnya kapabilitas bank dalam penyaluran kredit UMKM menjadi kendala utama.

Keterbatasan SDM dan banyaknya bank yang terbiasa dalam penyaluran kredit konsumtif juga menjadi faktor penghambat dalam penyaluran kredit produktif kepada UMKM. Di samping itu, jaringan kantor dan infrastruktur yang kurang mendukung. Dari penyaluran dana UMKM masih di dominasi oleh perbankan konvensional dengan persentase bunga rendah sebesar 12% pada tahun 2015 dan 9% pada tahun 2016. Data konsolidasi BI menjelaskan peningkatan UMKM yang signifikan ini karena dipengaruhi oleh suku bunga yang rendah. Meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuat bank nonpenyalur KUR semakin kesulitan dalam mendapatkan debitur baru yang potensial. Sementara dari sisi eksternal, perlambatan kinerja UMKM yang terdampak oleh kondisi ekonomi domestik menjadi kendala utama.

Sementara di perbankan syariah tidak ada KUR yang bunganya sangat rendah. Seharusnya pemerintah membuat skema pembiayaan khusus UMKM yang nilai marginnya sama seperti KUR 9%. Nilai jual produk syariah masih dihitung mahal dibanding perbankan konvensional. Besaran margin di bank syariah masih lebih mahal dibandingkan besaran bunga.

Penetapan margin keuntungan mempertimbangkan beberapa hal (Karim, 2004) diantaranya adalah *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu ditetapkan dalam rapat sebagai kompetitor langsung terdekat.

Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat perusahaan ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat. *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Oleh karena itu Perbankan syariah Indonesia masih belum bisa melaju pesat seperti perbankan konvensional.

Pembiayaan murabahah berperan penting dalam perbankan syariah karena pembiayaan ini mendominasi pendapatan bank syariah yaitu mencapai 75%. Tingginya *mark up* yang diambil oleh bank syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar. Kenaikan suku bunga yang besar yang terjadi menyebabkan bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun demikian, apabila suku bunga dipasar tetap stabil atau bahkan turun, maka margin murabahah akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional. *Mark-up* dalam murabahah dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga. Namun, nampaknya, perbedaan antara *mark up* murabahah di bank syariah dengan suku bunga dalam pinjaman kredit di bank konvensional ini tidak terlalu jauh. Oleh karena itu diperlukannya peran pemerintah dalam memajukan perbankan Syariah. Jika perbankan Syariah ingin berkembang pesat maka pemerintah harus membantu memberikan modal yang besar ke bank syariah

Karena faktor-faktor diataslah sehingga menyebabkan bank syariah membatasi dan sangat berhati-hati dalam pembiayaan UMKM, ditengah tengah pertumbuhan ekonomi yang kurang begitu bagus dan tingkat resiko yang cukup tinggi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini mengakibatkan terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70 % s/d 90 % kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non

formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang sangat tinggi.

Meskipun harga jual produk pembiayaan syariah masih lebih mahal dibanding perbankan konvensional. Sebagai seorang yang beragama Islam dan sebagai akademisi lembaga yang berbasis syariah, hal ini tidak menyurutkan penulis dalam melakukan penelitian di bank syariah. Penulis ingin membuktikan bahwa Sistem keuangan syariah terus berkembang cepat meskipun tak secepat perbankan konvensional. Terbukti dari data konsolidasi Bank Indonesia.

Total aset perbankan syariah (BUS ditambah UUS) di akhir 2016 sebesar Rp356,5 triliun, meningkat 20,3% atau lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 8,8%. DPK juga mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 2015, yaitu meningkat dari 7,8% menjadi 20,8% atau menjadi sebesar Rp279,3 triliun. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) juga mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu meningkat dari 7,4% dari 2015 menjadi 15,9% sehingga posisi PYD pada akhir 2016 menjadi sebesar Rp248,0 triliun (Grafik 8.26).

Grafik 1.10 Perkembangan Aset, Pembiayaan Yang disalurkan, Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah.



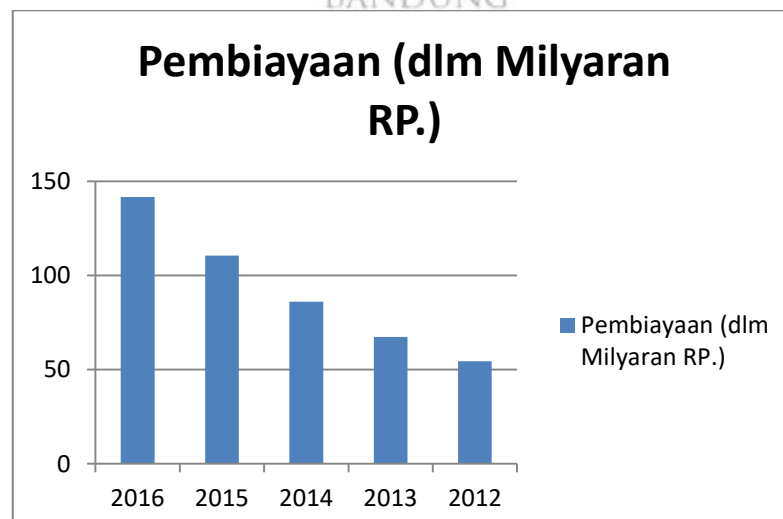
Sumber: Laporan Konsolidasi Bank Indonesia Tahun 2015-2016

Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan berdasar prinsip syariah yang kegiatan usahanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi antara surplus unit dengan defisit unit. Surplus unit adalah

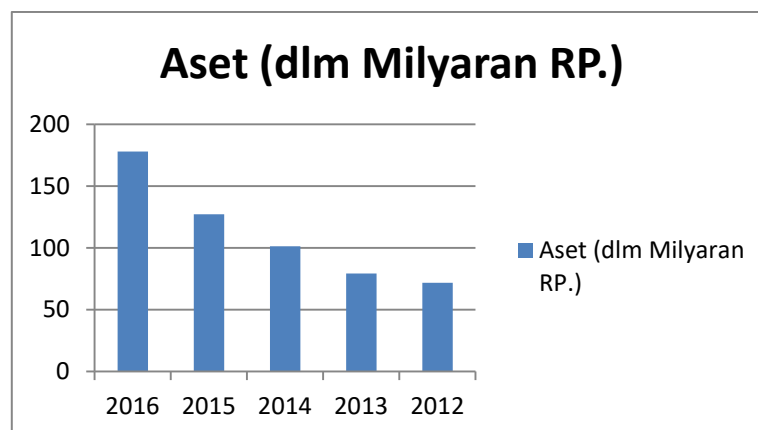
pihak/masyarakat kelebihan dana, sedangkan defisit unit adalah pihak/masyarakat yang membutuhkan/kekurangan dana. Hanya saja kegiatan BPRS lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian. Dengan demikian, kegiatan usaha BPRS secara mendasar adalah menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kendala-kendala diatas tidak menyurutkan BPRS Al Masoem turut serta dalam memajukan perekonomian Indonesia. Terbukti pangsa pasarnya lebih mengutamakan kalangan UMKM, dikala bank swasta nasional non devisa cenderung membatasi pembiayaan UMKM. BPRS Al-Masoempun tidak terlalu risau dengan tingkat resiko pembiayaan UMKM, jika satu jenis usaha macet, maka BPRS Al-masoem sudah berantisipasi dengan jenis usaha lainnya. Karena di dukung oleh group usaha Masoem yang jenis jenis usahanya maju dan dikenal di wilayah Bandung Timur. Disamping itu nasabah dapat melakukan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, harga jual lebih murah disbanding BPRS lain yang ada di wilayah Bandung Timur dan angsuran tetap hingga jatuh tempo. Diharapkan dengan fasilitas yang diberikan masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal. Berikut data pertumbuhan BPRS Al-Masoem.

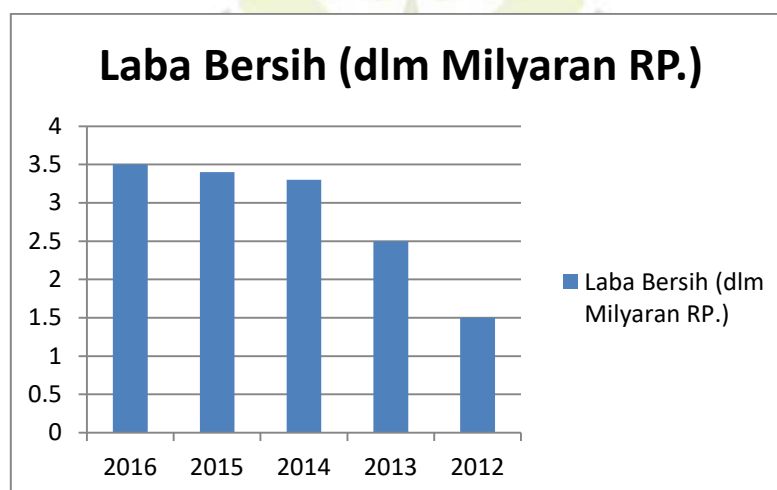
Grafik 1.11. Pertumbuhan Pembiayaan BPRS Al-Masoem



Grafik 1.12. Aset BPRS Al-Masoem



Grafik 1.13. Laba Bersih BPRS Al-Masoem



Tidak dipungkiri keputusan Nasabah dalam Mengambil pembiayaan pada suatu bank akan dapat meningkatkan eksistensi bank tersebut untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang semakin ketat, di samping itu dengan adanya nasabah yang mengambil pembiayaan menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk pembiayaan bank tersebut. Dengan demikian Keputusan Nasabah dalam mengambil pembiayaan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu bank terlebih BPRS Al-Masoem. Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pelayanan yang sesuai dengan apa

yang diinginkan nasabah, maka Pelayanan bank dikatakan baik, hal ini akan menimbulkan perasaan senang pada diri nasabah dan mendorong nasabah untuk melakukan pengambilan pembiayaan lagi. Sebaiknya jika bank tidak dapat memberikan Pelayanan sesuai dengan yang diinginkan nasabah, berarti pelayanan disebut kurang baik dan nasabah tidak akan tertarik lagi mengambil ulang. Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulanan. Nilai margin yang murah, kecepatan bank melayani pengambilan pembiayaan, dan syarat-syaratnya tidak sulit, dan cepat mengakses pengajuan pembiayaan akan membuat minat nasabah untuk mengambil pembiayaan kembali dan nasabah mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk mengambil pembiayaan pada BPRS Al-Masoem. Terbukti dari jumlah nasabahnya yang mencapai 17.000 nasabah. Hal ini juga didukung dengan tingkat kepercayaan masyarakat atas majunya group usaha masoem.

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem.*

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah seberapa pengaruh margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi terhadap pertumbuhan UMKM pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem. Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh margin pada pembiayaan murabahah secara parsial terhadap pertumbuhan UMKM pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem?
2. Seberapa besar pengaruh inflasi secara parsial terhadap pertumbuhan UMKM pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem?

3. Seberapa besar pengaruh margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi secara simultan terhadap pertumbuhan UMKM pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh margin pada pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan UMKM pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan UMKM pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi secara bersamaan terhadap pertumbuhan UMKM pada periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara Akademis:

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Ekonomi Syariah, khususnya untuk Bank Umum Syariah tentang margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi terhadap pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan pada pengembangan dalam keuangan di Bank Umum Syariah di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis:

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam satu karya tulis pada konsentrasi ilmu Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain akan tetapi menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa¹² yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri. Hal yang sama dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM. Yang membedakan dari penelitian ini adalah teknik analisis data, objek penelitian, tahun yang dianalisis serta variabel yang diteliti berbeda sehingga dimungkinkan hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Engkus Kusnandar¹³ yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit UMKM. Metode analisis yang digunakan adalah explanatory research. Berdasarkan penelitian ini pada kelompok Bank Pembangunan Rakyat(BPR) menunjukkan hasil analisis bahwa NPL, DPK, Inflasi berpengaruh pada peningkatan kredit UMKM. Hal hampir mirip dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis pengaruh Inflasi terhadap pemberian kredit UMKM. Yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitian, tahun yang dianalisis serta variabel yang diteliti lebih banyak sehingga dimungkinkan hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Glently Kaunang¹⁴ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga pinjaman dan kredit macet terhadap

¹²Rifka Annisa, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri*(Studi BMT Hidayatul Muamalah 2005-2010). (Surakarta :Perbankan Syari'ah, 2017), xiii.

¹³Engkus Kusnandar, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit UMKM Oleh Perbankan Di Indonesia*(Studi Bank Indonesia 2005-2010). (Jakarta : Fakultas Ekonomi, 2012), 64.

¹⁴Glently Kaunang, *Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dan Kredit Macet Pengaruhnya terhadap Permintaan Kredit UMKM Di Indonesia* (Studi Bank Indonesia 2007-2012). (Manado : Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September, 2009), 920.

permintaan kredit UMKM di Indonesia. Teknis analisis linier berganda, dengan menggunakan metode analisis ordinary least square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM, serta kredit macet memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM. Hal yang hampir sama dari penelitian ini adalah pengaruh bunga terhadap pertumbuhan UMKM. Yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitian, tahun yang dianalisis serta variabel yang diteliti berbeda sehingga dimungkinkan hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nuraini¹⁵ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat margin terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan hasil analisis bahwa adanya pengaruh variabel tingkat margin (X) secara simultan terhadap variabel keputusan pengambilan pembiayaan *murabahah* (Y) dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,977 atau 97,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat margin memberikan kontribusi besar terhadap keputusan pengambilan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Sedangkan 2,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hal yang hampir sama dari penelitian ini adalah pengaruh margin terhadap keputusan pengambilan murabahah. Yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitian, tahun yang dianalisis serta variabel yang diteliti berbeda sehingga dimungkinkan hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyanti¹⁶ yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah. Dengan analisis metode regresi linier berganda, *backward*, *forward* dan *stepwise*. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan hasil analisis

¹⁵Aisyah Nuraini, *Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo* (studi BMT Sidogiri Cabang Waru 2015). (Sidoarjo: Jurnal Vol.05, No.01, April 2015), 322.

¹⁶Sri Mulyanti, *faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pada BMT khairu ummah leuwiliang* (Studi Kasus pada BMT Khairu Ummah Leuwi Liang. (Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 2011), iii

bahwa faktor yang mempengaruhi penetapan margindi BMT ini adalah biaya operasional, biaya bagi hasil, pendapatan pembiayaan dan tingkat pengembalian murabahah. BI *rate* ternyata tidak berpengaruh dalam penetapan margin. Yang membedakan dari penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel-variabel penelitian, tahun yang digunakan oleh penelitian ini yaitu tahun 2007-2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Purwaningsih¹⁷ yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran margin pembiayaan murobahah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Diperoleh hasil bahwa factor biaya operasional, Return On Asset(ROA), Sertifikat Bank Indonesia, Suku Bunga Pinjaman Bank Konvensional/Base Landing Rate(BLR), secara signifikan mempengaruhi margin murobahah. Sedangkan profit target tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah. Yang membedakan dari penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel-variabel penelitian, tahun yang digunakan oleh penelitian ini yaitu tahun 2000-2009..

Tabel 1.4

Analisis Perbandingan

No	Peneliti dan Judul	Variabel dan Alat Analisis	Kesimpulan	Analisis Perbandingan	
				Persamaan	Perbedaan
1	Rifka Annisa dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah	X1(pembiayaan murabahah), X2(pembiayaan mudharabah) Y(perkembangan UMKM)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan	Ada variabel yang sama sama X(pembiayaan Murabahah). Y(Pertumbuhan UMKM)	teknik analisis data, objek penelitian,tahun yang dianalisis serta variabel yang diteliti

¹⁷Iin Purwaningsih, *Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah*(Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK. (Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012), iii

	dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM	dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif	pembiayaan mudharabah berpengaru h terhadap perkembang an UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.		berbeda sehingga dimungkinka n hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya.
2	Engkus Kusnandar dengan judul faktor- faktor yang mempengar uhi pemberian kredit UMKM.	X1(CAR), X2(NPL) X3(BOPO) X4(LNDPK) X5(ROA) X6(INFLASI) Y(perkembangan Metode analisis yang digunakan adalah explanatory research.	NPL, DPK, Inflasi berpengaru h pada peningkatan kredit UMKM.	Hal hampir mirip dari penelitian ini adalah sama- sama menganalisis pengaruh Inflasi terhadap pemberian kredit UMKM.	Yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitian, tahun yang dianalisis serta variabel yang diteliti lebih banyak sehingga dimungkinka n hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya
3	Glently	X1(Suku	Hasil	Hal yang	Yang

	<p>Kaunang yang berjudul pengaruh tingkat suku bunga pinjaman dan kredit macet terhadap permintaan kredit UMKM di Indonesia</p>	<p>Bunga pinjaman), X²(Kredit Macet), Y(Permintaan Kredit UMKM di Indonesia. Adapun Teknis analisis yang digunakan regresi linier berganda, dengan menggunakan metode analisis ordinary least square(OLS).</p>	<p>penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM, serta kredit macet memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM</p>	<p>hampir sama dari penelitian ini adalah pengaruh bunga terhadap pertumbuhan UMKM.</p>	<p>membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitian, tahun yang dianalisis serta variabel yang diteliti berbeda sehingga dimungkinkan hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya.</p>
--	---	---	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variable, yaitu:

1. Teori tentang margin pada pembiayaan murabahah, Menurut Adiwarman A. Karim, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan

pembeli.¹⁸ Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik murābahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Penentuan harga merupakan aspek yang sangat penting mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Jika harga jual murābahah yang ditawarkan terlalu tinggi, maka daya beli nasabah rendah atau kurang diminati dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukum teori permintaan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. ”Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat.¹⁹ Adapun data yang digunakan dalam menganalisis pengaruh margin pada pembiayaan murabahah adalah diperoleh dari laporan keuangan perbulan Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Masoem dari tahun 2015-2016.

2. Teori tentang Inflasi²⁰ sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara.
3. Pertumbuhan UMKM Pengertian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

¹⁸ Adiwarmam A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

¹⁹ Paul A. Samuelson, *Ilmu Mikroekonomi* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), 173.

²⁰ Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. (2001). *Makro Ekonomi, Edisi keempatbelas*. Jakarta.

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Adapun kriteria UMKM adalah :

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

Kriteria			
No	Uraian	Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- e. Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, oleh karena pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun mengalami peningkatan, Data Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 48,9 Juta unit, dan terbukti memberikan kontribusi 53,28% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan 96,18% terhadap penyerapan tenaga kerja. Usaha kecil dan menengah (UMKM) juga merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UMKM

memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

f. Hubungan Fungsi Biaya, Fungsi Permintaan dan Perkembangan Aset pada UMKM

Biaya atau ongkos²¹ pengertian secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi, dengan notasi $C = f(Q)$.

Dimana:

C = Biaya Total

Q = Jumlah Produksi.

Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan, fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Dalam membicarakan biaya ada beberapa macam biaya, yaitu:

- 1) Biaya Total (Total Cost = $TC = C$)
- 2) Biaya Variabel (Variable Cost = VC)
- 3) Biaya Tetap (Fixed Cost = FC)
- 4) Biaya Total Rata-Rata (Average Total Cost = AC)
- 5) Biaya Variabel Rata Rata (Average Variable Cost = AVC)
- 6) Biaya Tetap Rata-Rata (Average Fixed Cost = AFC)
- 7) Biaya Marginal (Marginal Cost = MC)

Pada UMKM, sebagai suatu usaha biaya dapat terbagi-bagi sesuai dengan tujuan, ada biaya variabel dan ada juga biaya tetap, salah satu biaya dalam operasional suatu bisnis adalah biaya bunga dan beban inflasi yang harus ditanggung.

Dalam menganalisa biaya umumnya tidak terlepas dari analisa penerimaan atau total revenue. Revenue adalah seluruh pendapatan yang diterima dari

²¹ Sukirno, Sadono. 2005. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Secara matematik total revenue dirumuskan sebagai berikut:

$$TR = PQ.$$

Dimana TR = Penerimaan/Revenue Total,

P = Harga Baran

Q = Jumlah barang yang dijual.

Jumlah barang yang dijual²² dapat dituliskan dalam bentuk fungsi permintaan, fungsi permintaan sesungguhnya menunjukkan hubungan antara variabel jumlah barang yang diminta dengan semua variabel yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah barang yang diminta tersebut. Fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$Qa = f(PA, PB-Z, I, T, A, N)$$

Keterangan :

Qa = Jumlah barang yang diminta

PA = Harga barang A

PB-Z = Harga barang lain

I = Tingkat pendapatan konsumen

T = Selera

A = Pengeluaran perusahaan untuk advertensi

N = Jumlah penduduk

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa, fungsi penerimaan berkaitan erat dengan fungsi permintaan atas suatu barang yang ditawarkan. Berdasarkan fungsi permintaan maka dapat diturunkan fungsi perkembangan aset, dimana barang yang semakin diminati maka akan semakin tinggi penjualannya, dan penjualan yang semakin tinggi akan membuat laba semakin tinggi dan pada akhirnya membuat aset suatu usaha semakin bertambah, hal tersebut umum terjadi pada semua jenis usaha, termasuk pada UMKM. Jika asset bertambah maka UMKM pun akan mengalami pertumbuhan

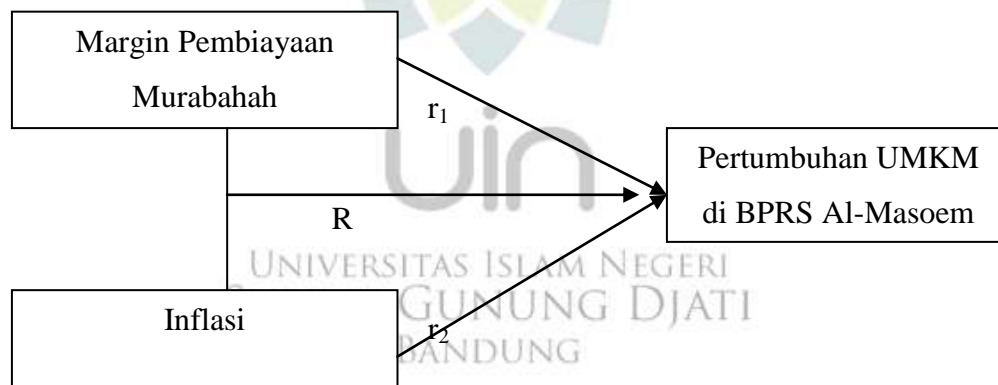
Hubungan ketiga konsep tersebut adalah dalam unsur-unsurmarginal pada pembiayaan murabahah dan inflasi berkaitan dan berhubungan dengan

²² Sukirno, Sadono. 2005. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

pertumbuhan peminjam modal umkm di bank. Dalam penelitian ini akan melakukan penelitian mengenai margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi. Kedua konsep tersebut sangat berhubungan karena margin merupakan salah satu bagian yang menjadi salah satu pertimbangan utama ketika pengusaha/konsumen meminjam modal, semakin kecil persentase marginnya maka akan mempengaruhi terhadap minat pengusaha meminjam modal ke bank. Inflasi pun akan mempengaruhi perkembangan usaha seseorang. Ketika harga jual bahan pokok mahal, maka harga produksi akan tinggi sehingga akan berpengaruh pada jumlah permintaan, dan tingkat pengembalian pengusaha atau konsumen ke bank.

Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2017

Gambar tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara margin pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan UMKM di BPRS Al-Masoem dan terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap Pertumbuhan UMKM di BPRS Al-Masoem, serta secara bersamaan margin pembiayaan murabahah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM di BPRS Al-Masoem.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.²³ Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data.

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi terhadap pertumbuhan UMKM periode 2015-2016 di BPRS Al-Masoem.

- H_0
1. Tidak terdapat pengaruh margin pada pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode 2015-2016 di Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Al-Masoem.
 2. Tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode 2015-2016 di Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Al-Masoem.
 3. Tidak terdapat pengaruh margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode 2015-2016 di Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Al-Masoem.
- H_a
1. Terdapat pengaruh margin pada pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode 2015-2016 di Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Al-Masoem.
 2. Terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode 2015-2016 di Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Al-Masoem.
 3. Terdapat pengaruh margin pada pembiayaan murabahah dan inflasi terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode 2015-2016 di Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Al-Masoem.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 93.